SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK
KOTA SABANG TAHUN 2019–2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menyusun rencana aksi daerah kota layak anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sabang Tahun 2019-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Sabang Menuju Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SABANG TAHUN 2019-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan kota layak anak.

7. Kota ...

7. Kota Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
8. Layak adalah kondisi fisik dan nonfisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
10. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.

Pasal 2

RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022 dijabarkan dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022 adalah sebagai pedoman untuk pengembangan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.

(2) Tujuan RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022 adalah:
   a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, gampong dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak;
   b. memenuhi dan melayani kebutuhan serta kepentingan terbaik terhadap anak;
   c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada pemerintah daerah, kecamatan, gampong dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak; dan
   d. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

BAB III
PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

(1) Penyusunan RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022 mengacu pada indikator KLA dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022.

(2) Penyusunan ...

(2) Penyusunan RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022 mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan yang ada di Kota Sabang.

(3) RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan pengembangan KLA jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang diarahkan pada pemenuhan hak anak meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
e. perlindungan khusus.

BAB IV
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Gugus Tugas Kota Layak Anak melaksanakan kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022.

(2) Gugus Tugas Kota Layak Anak memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

(3) Gugus Tugas Kota Layak Anak melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022.

(4) Gugus Tugas Kota Layak Anak melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun untuk menganalisa dan menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK
KOTA SABANG TAHUN 2019-2022

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SABANG TAHUN 2019-2022

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR/2018	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN										
1	Qanun/Peraturan Wali Kota tentang KLA	Peraturan Walikota Sabang tentang Perlindungan Anak	Tersedianya Peraturan Walikota Sabang tentang Perlindungan Anak	Dokumen	-	-	1	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Peraturan Walikota Sabang tentang Pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak	Tersedianya Peraturan Wali Kota Sabang tentang KLA	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		FGD penyusunan Peraturan Walikota Sabang tentang Pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak dengan SKPK,Forum Anak,LM,dunia usaha dan media	Draf perwal tentang Pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Perwal tentang pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak	jumlah peserta sosialisasi	orang	-	100	-	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Peraturan ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Peraturan Wali Kota tentang RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022.	Tersedianya Peraturan Wali Kota Sabang tentang RAD-KLA Kota Sabang Tahun 2019-2022	Dokumen	-	-	1	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Tersedianya Qanun KLA	Dokumen	-	-	-	-	1	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Surat Keputusan Walikota Sabang tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA	Terbentuknya Gugus Tugas KLA	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas dan pemahaman Gugus Tugas KLA	meningkatnya kemampuan serta peran aktif gugus tugas KLA	orang	-	4	8	23	38	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA)	Tersusunnya dokumen RAD KLA	Dokumen	-	-	1	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		FGD penyusunan Peraturan Walikota Sabang tentang rencana aksi daerah KLA	Draf peraturan Walikota Sabang tentang rencana aksi daerah KLA	Dokumen	-	1		-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sosialisasi Peraturan Walikota Sabang tentang rencana aksi daerah KLA	Jumlah peserta sosialisasi	orang	-	75		-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota,Gugus Tugas,Dunia Usaha,LM dan Media	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pembentukan Gampong Ramah Anak	Jumlah Gampong yang dicanangkan sebagai gampong ramah anak	gampong	-	4	4	5	5	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan data dan informasi profil anak	Tersedianya data dan informasi profil anak	dokumen	-	-	-	1	1	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, BPS, Disduk Capil	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
		Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang dicanangkan sebagai kecamatan layak anak	kecamatan	-	2	-	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, SETDA Kota	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Terbentuknya Lembaga PUSPAGA	PUSPAGA	-	-	-	1	1	Dinsos, PMG, PP dan PA, Dinkes dan KB, dan PKK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah gampong yang memiliki PATBM	gampong	-	-	4	4	4	Dinsos, PMG, PP dan PA, serta Gampong	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		kerja sama dengan RRI kota sabang dalam kegiatan Talk show,forum anak dan gugus tugas KLA	jumlah kegiatan talk show/penyebaran informasi	forum anak dan gugus tugas KLA	2	1	2	2	2	Dinsos, PMG, PP dan PA, Dinkes dan KB, dan PKK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

kerja ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kerja sama dengan dunia usaha kota sabang dalam kegiatan car free day	jumlah kegiatan car free day	kegiatan	3	4	5	6	7	Dinsos, PMG, PP dan PA, serta Gampong	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
II	KLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	Tersedianya Peraturan Wali Kota Tentang Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	dokumen	-	1	-	-	-	Disdukcapil dan SETDA Kota	PROGRAM PENCATATAN SIPIL/Pelayanan Pencatatan Sipil
		Penyusunan Perwal tentang Prosedur Pelayanan Kartu Identitas Anak	Tersedianya Peraturan walikota tentang Prosedur Pelayanan Kartu Identitas Anak	dokumen	-	1	-	-	-	Disdukcapil dan SETDA Kota	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Akte Kelahiran	Persentase anak yang mendapatkan kutipan akte kelahiran	%	95	96	100	100	100	Disdukcapil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL/Pelayanan Pencatatan Sipil
		Pelayanan KIA	Jumlah anak yang mendapatkan KIA	%	65.5	65.5	70.5	80.5	90.5	Disdukcapil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Sosialisasi perwal tentang Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Prosedur Pelayanan Kartu Identitas Anak dan hak-hak anak untuk memperoleh akta kelahiran	Jumlah gampong yang mengikuti sosialisasi	Gampong	-	-	-	18	-	Disdukcapil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Kemitraan dengan instansi terkait dalam pemberian akte kelahiran	Jumlah MoU dengan instansi terkait	PKS	-	3	-	1	-	Disdukcapil, Dinkes dan RSUD	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyusunan Kebijakan/Keputusan tentang Informasi Layak Anak	Tersedianya Regulasi tentang Informasi Layak Anak	Surat Keputusan	-	-	-	1	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak Atas Informasi Layak Anak (ILA)	Jumlah Perpustakaan	Pustaka	1	-	-	1	1	Setda Kota Sabang, Dinas Arsip dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN/ Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengunjung perpustakaan dan perpustakaan keliling per tahun	orang	57	40	600	600	600	Setda Kota Sabang, Dinas Arsip dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN/ Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Taman Baca	Taman baca	1	-	-	1	1	Setda Kota Sabang, Dinas Arsip dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN/ Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Pengembangan Pustaka Gampong	Pustaka Gampong	-	-	-	-	18	Setda Kota Sabang, Dinas Arsip dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN/ Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota
			Terlaksananya Kegiatan Lomba Bercerita	Kegiatan	1	-	1	1	1	Setda Kota Sabang, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Disdikbud	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN/ Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terciptanya sumber daya pelayanan perpustakaan yang baik	Orang	6	-	-	28	28	Setda Kota Sabang, Dinas Arsip dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN/ Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota
6.	Pelembagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Gampong	Jumlah forum anak	Forum Anak	-	6	4	5	5	Dinsos, PMG, PP dan PA, Kecamatan dan Gampong	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Musrenbang Anak Skala Kota	Perwakilan anak yang terlibat	Anak	-	-	-	26	-	Bappeda, Dinsos, PMG, PP dan PA, kecamatan dan gampong	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA/Musrenbang Pembangunan Manusia
		Penguatan Kapasitas Forum Anak Kota, Kecamatan dan Gampong	Jumlah anak yang dilatih	Anak	50	130	160	100	100	Dinsos, PMG, PP dan PA, Kecamatan dan gampong	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	KLUSTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
7.	Pencegahan Perkawinan Anak	Penyusunan Peraturan Walikota Sabang tentang Penanganan dan Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini	Tersedianya Peraturan Walikota Sabang tentang Penanganan dan pencegahan perkawinan Anak Usia Dini	Dokumen	-	-	-	1	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Setda Kota Sabang, Kemenag, dan Dinkes & KB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/ Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Peraturan Walikota Sabang tentang Penanganan dan pencegahan perkawinan anak usia dini	Jumlah peserta sosialisasi	orang	-	-	-	-	100	Dinsos, PMG, PP dan PA, Setda Kota Sabang, Kemenag dan Dinkes & KB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/ Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pendewasaan Usia Kawin	Jumlah Dispensasi perkawinan anak usia dini	Kasus	1	0	0	0	0	Dinsos, PMG, PP dan PA, Mahkamah Syariah	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/ Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga	Pelatihan bagi pengurus LK3 dan PUSPAGA	Jumlah pengurus LK3 Yang terlatih	Orang	-	3	3	4	5	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah pengurus PUSPAGA yang terlatih	Orang	-	-	-	-	4	Dinsos, PMG, PP dan PA, Dinkes dan KB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD -HI)	Pengembangan PAUD HI	Jumlah satuan PAUD yang menerapkan PAUD HI	PAUD	-	-	-	2	2	Disdikbud, Dinkes dan KB, Disdukcapil	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengembangan BKB HI	Jumlah BKB HI	jumlah	4	-	-	2	-	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)/Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Peningkatan Kompetensi guru PAUD	Jumlah Guru paud yang paham KHA	orang	-	-	2	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

10. Standarisasi ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah LKSA yang tersertifikasi	lembaga	-	-	-	1	-	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Penyediaan infrastruktur Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	-	1	-	1	1	Dinas PUPR, Disdikbud, Dinas Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)/ Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah Sekolah/Madrasah yang difasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Sekolah/ Madrasah	-	-	-	-	1	Dinas PUPR, Dishub dan Disdikbud	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Pembangunan Zone Selamat Sekolah	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	sekolah/ madrasah		2	-	1	1	Dinas PUPR, Dishub dan Disdikbud	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
IV	KLASTER III: KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
13	Status Gizi Balita	Pemberian makanan tambahan untuk Balita	persentase balita yang mendapat makanan tambahan	%	86%	87%	88%	89%	90%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun	Peningkatan gizi anak dibawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	33%	26%	47%	50%	55%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusu dini	%	4%	27%	47%	50%	56%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Pojok ASI/Ruang Laktasi	% Pojok ASI	-	5	10	30	50	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	80%	80%	81%	83%	85%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15	Fasilitas Kesehatan dengan Layanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	jumlah puksesmas ramah ana	Puskesmas	-	6	6	6	6	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Rumah Sakit Ramah Anak	Rumah Sakit	-	-	1	1	1	RSUD Kota Sabang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Rumah sakit terakreditasi	Rumah Sakit	1	1	1	2	2	RSUD Kota Sabang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah puskesmas terakreditasi	Puskesmas	2	6	6	6	6	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan kesehatan anak	Pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Orang	-	2	4	24	44	Dinkes dan KB	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			Persentase imunisasi dasar lengkap	%	63%	56%	95%	96%	97%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	77%	58%	95%	96%	97%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Cakupan kunjungan bayi	%	65%	68%	94%	95%	96%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Peningkatan akses air minum	Persentase penduduk berakses air minum	%	74.75%	78%	84%	89%	90%	Dinas PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM /Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Persentase sarana air minum dalam pengawasan	%	89.00%	90%	90%	90%	91%	Dinas PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM /Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota
		Persentase sarana air minum dalam pengawasan	Persentase penduduk berakses air minum	%	75%	78%	84%	89%	90%	Dinas PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM /Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota
		Peningkatan akses sanitasi layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%	81.00%	83.00%	85.00%	90.00%	95.00%	Dinas PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE/ Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainaseyang Terhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota
17	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok	Tersedianya Qanun KTR	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinkes dan KB, Bag. Hukum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Sosialisasi Qanun Kawasan Tanpa Rokok dengan melibatkan Forum Anak	Terlaksananya Sosialisasi Qanun Kawasan Tanpa Rokok	Orang	-	-	100	-	-	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyediaan KTR dan larangan IPS Rokok	Persentase penerapan KTR di sarana publik	%	-	25%	50%	750%	85%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
V.	KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA										
18	Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan	Angka partisipasi murni (APM SD/MI/Paket A)	%	99,83	99,83	100	100	100	Disdik pora	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Angka ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Angka partisipasi murni (APM SMP/MTs/Paket B)	%	99,44	99,44	100	100	100	Disdik pora	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	%	80%	80%	82%	84%	86%	Disdik pora	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	%	75%	75%	77%	79%	82%	Disdik pora	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama
		Penguatan PAUD	APK Paud	%	80,68	80,68	81,68	82,68	83,68	Disdik Pora	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	satuan pendidikan	4	7	8	10	10	Disdik Pora	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan dengan SK	sekolah/ madrasah	2	5	10	15	20	Dinsos, PMG, PP dan PA, Disdik Pora, Bagian Hukum, Kemenag	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi menuju SRA	SRA	5	10	15	20	25	Dinsos, PMG, PP dan PA, Disdik Pora, Bagian Hukum, Kemenag	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelatihan SDM KHA bagi tenaga pendidik	Jumlah SDM terlatih KHA	Orang	1	2	4	24	39	Dinsos, PMG, PP dan PA, Disdik Pora, Dinkes	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak	Festival kegiatan budaya/kreatifitas anak	Jumlah kegiatan budaya	Kegiatan	2	3	4	4	5	Disparbud	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah lapangan olah raga	Unit	3	3	3	4	4	Disdikpora	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/Pembinaan dan Pengembangan OlahragaPendidikan Pada Jenjang Pendidikan yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
VI	KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS										
21.a	Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah gampong yang menjalankan PATBM	gampong	-	-	-	8	12	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sosialisasi terpadu lintas sektor tentang penanganan kasus anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan kasus anak	orang	-	-	-	100	100	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
21.b	Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Sosialisasi tentang larangan pekerja anak dengan melibatkan forum anak	orang	-	-	-	100	100	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
22.a	Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah anak penyalahan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial	orang/%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes dan KB, Dinsos	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi pencegahan pornografi malalui parenting	Jumlah keluarga tanggap pornografi	orang	-	-	-	75	150	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengobatan anak kasus HIV	Persentase penangan kasus HIV	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes dan KB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

22.b Pelayanan ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.b	Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Pelatihan Mitigasi bancana disekolah	Jumlah sekolah tangguh bencana	Sekolah	1	2	3	4	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Fasilitasi gampong tangguh bencana	jumlah gampong tangguh bencana	Gampong	1	2	3	4	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakatterhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Pemberian bantuan sosial pasca bencana	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial pasca bencana	KK/%	70KK/100%	29 KK/100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinsos, PMG, PP	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam danSosial Kabupaten/Kota
23.a	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang menerima bantuan sosial	orang/%	397 orang/100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat	Terlaksananya pemberdayaan bagi penyandang Cacat	orang	20	-	-	35	50	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Fasilitasi sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas	persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	%	21	30	40	50	60	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

23.b Pelayanan ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.b	Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah KIE melalui media publik tentang Perlindungan anak berkebutuhan khusus terutama bagi anak PSM	Kegiatan	-	-	-	1	1	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
24.a	Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi	Fasilitasi ABH	Persentase ABH yang mendapat putusan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan	%			70%	70%	70%	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yangMelibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota
			Persentase ABH yang mendapat layanan reintegrasi sosial	%		85%	85%	85%	85%	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Penyediaan Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
24.b	Pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak terlantar/jalanan, berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Anak%	20%	25%	25%	30%	35%	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL/Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		Fasilitasi penanganan ABK	Pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	%		90%	90%	90%	90%	Dinsos, PMG, PP dan PA	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/Penyediaan Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
KOTA SABANG MENUJU KOTA LAYAK ANAK 2019 - 2023

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR/20	TARGET				INSTANSI PENANGG	PROGRAM/
						2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	KELEMBAGAAN										
1	Qanun/Peraturan Walikota tentang KLA	Penyusunan Peraturan Walikota Sabang tentang Pengenbangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak	Tersedianya Peraturan Walikota Sabang tentang KLA	%	-	100				Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Penyusunan Qanun KLA	Tersedianya Qanun KLA	%				50	50	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Pembentukan Gugus Tugas KLA	Terbentuknya Gugus Tugas KLA	%	-	100				Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Peningkatan kapasitas Kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah Gugus Tugas KLA yang terlatih KHA	orang	-	50	50	50	50	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (KLA)	Tersusunnya dokumen RAD KLA	%	-	50	50	-	-	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Fasilitasi Pembentukan Gampong Ramah Anak	Jumlah Gampong yang dicanangkan sebagai gampong ramah anak	gampong	0	4	4	4	4	Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Pembentukan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Sekolah Ramah Anak	sekolah/ madrasah	0	2	4	4	5	Dinsos, PMG, PP dan PA, Disdik Pora, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang dicanangkan sebagai gampong ramah anak	kecamatan	-	-	2			Dinsos, PMG, PP dan PA, Bappeda, Bagian Hukum	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Terbentuknya Lembaga PUSPAGA	PUSPAGA	-		1	1		Dinsos, PMG, PP dan PA, dan PKK	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah gampong yang memiliki PATBM	gampong	-	-	2	4	6	Dinsos, PMG, PP dan PA, serta Gampong	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Penyusunan Peraturan walikota tentang Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	Tersedianya Peraturan Walikota tentang Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	%	-	100	-	-	-	Disdukcapil dan Bagian Hukum Setda Kota	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Penyusunan Perwal tentang Prosedur Pelayanan Kartu Identitas Anak	Tersedianya Peraturan walikota tentang Prosedur Pelayanan Kartu Identitas Anak	%	-	100	-	-	-	Disdukcapil dan Bagian Hukum Setda Kota	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Pelayanan Akte Kelahiran	Persentase anak yang mendapatkan kutipan akte kelahiran	%						Disdukcapil	Program Penataan Administrasi Kependudukan

		Pelayanan KIA	Jumlah anak yang mendapatkan KIA	%						Disdukcapil	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Sosialisasi perwal tentang Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Prosedur Pelayanan Kartu Identitas Anak dan hak-hak anak untuk memperoleh akta kelahiran	Jumlah gampong yang mengikuti sosialisasi	Gampong			18			Disdukcapil	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil
		Kemitraan dengan instansi terkait dalam pemberian akte kelahiran	jumlah MoU dengan instansi terkait	PKS		4	4	4	4	Disdukcapil	Peningkatan Pelayanan Publik
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi layak Anak (ILA)	Penyusunan kebijakan/ Keputusan tentang Informasi Layak Anak	Tersedianya Regulasi tentang Informasi Layak Anak	Surat Keputusan	-		1			Dinas komunikasi, informasi dan persandian	

		fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak (ILA)	Jumlah per	pustaka						Setda Kota Sabang	
			Jumlah pengunjung perpustakaan dan perpustakaan keliling per tahun	orang						Setda Kota Sabang	
			Jumlah Taman Baca	Taman baca						Setda Kota Sabang	
			Jumlah Pustaka Gampong	Pustaka Gampong		18	18	18	18	Setda Kota Sabang	
			Persentase program dan siaran ramah untuk anak	program						Setda Kota Sabang	
			Terlaksananya Kegiatan Lomba Bercerita	kegiatan						Setda Kota Sabang	
			Terciptanya sumber daya pelayanan perpustakaan yang baik	kegiatan						Setda Kota Sabang	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
6.	Pelembaga	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Gampong	Jumlah for	FA	5	5	9	13	17	Dinsos, PMG, PP dan PA	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

		Penguatan kapasitas Forum Anak Kota, kecamatan dan Gampong	Jumlah for	FA	5	5	9	13	17	Dinsos, PMG, PP dan PA	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
III	KLSATER ii: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN										
7.	Pencegaha	Penyusunan Peraturan Walikota Sabang tentang Penanganan dan pencegahan perkawinan anak usia dini	Tersediannya Peraturan Walikota Sabang tentang Penanganan dan pencegahan perkawinan Anak Usia Dini	%	-		100			Dinsos, PMG, PP dan PA	
		Sosialisasi Peraturan Walikota Sabang tentang Penanganan dan pencegahan perkawinan anak usia dini	Jumlah peserta sosialisasi	orang				100		Dinsos, PMG, PP dan PA	
		Pendewasaan Usia Kawin	Jumlah Dispensasi perkawinan anak usia dini	Kasus	1					Mahkamah Syariah	

			Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan/atau sedang hamil anak pertama	%						Dinas Kesehatan dan KB	Program Keluarga Berencana
			Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	orang						Dinas Kesehatan dan KB	Program Keluarga Berencana
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga	Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Terbentuknya PUSPAGA				1			Dinsos, PMG, PP dan PA	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Jumlah Keluarga yang terlayani oleh PUSPAGA	keluarga	-	-				Dinsos, PMG, PP dan PA	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

		Fasilitasi Pembinaan Keluarga Balita	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga							Dinas Kesehatan dan KB	Program Keluarga Berencana
		Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarkan Pendidikan Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter	satuan pendidikan							
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD - HI)	Pembentuk	Terselenggaranya PUAD HI	PAUD HI	-		2 satuan Paud		2 satuan Paud	Disdik Pora	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Penguatan	Persentase partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%						Disdik Pora	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Jumlah lembaga yang mengadakan pendidikan pengasuhan	satuan pendidikan							
			Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	satuan pendidikan						Disdik Pora	

10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah LKS	lembaga						Dinsos, PMG, PP dan PA	
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Penyediaan infrastruktur Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA						Dinas PUPR, dan Disdik Pora	
		Pembangunan RASS	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	sekolah/ madrasah	2					Dinas PUPR, Dishub dan Disdik Pora	
		pembangunan ZOSS	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	sekolah/ madrasah						Dinas PUPR, Dishub dan Disdik Pora	
IV	KLASTER III: KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Persentase Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan	%						Dinkes dan K	Jaminan Persalinan

			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%					Dinkes dan K	Jaminan Persalinan
			Cakupan pelayanan ibu nifas dan cakupan pertolongan persalinan di faskes	%					Dinkes dan K	Jaminan Persalinan
			Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%					Dinkes dan K	Jaminan Persalinan
			Angka kelangsungan hidup bayi	Jumlah					Dinkes dan K	Jaminan Persalinan
			Angka Kematian balita per 1000 kelahiran hidup	orang					Dinkes dan K	Jaminan Persalinan
13	Status Gizi	Pemberian makanan tambahan untuk Balita	persentase balita yang mendapat makanan tambahan	%					Dinkes dan K	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

			Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%					Dinkes dan K		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun	Peningkatan gizi anak dibawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%					Dinkes dan K		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
			Persentase bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusu dini	%					Dinkes dan K		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
			Jumlah Pojok ASI/Ruang Laktasi	Pojok ASI					Dinkes dan K		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%					Dinkes dan K		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
15	Fasilitas Kesehatan	Fasilitasi pelayanan	jumlah puk	Puskesmas		6	6	6	6	inkes dan KB	

	dengan Layanan Ramah Anak	ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Ramah Anak	Rumah Sakit			1			RSUD Kota Sabang	
			Jumlah Rumah sakit terakreditasi	Rumah Sakit		1				RSUD Kota Sabang	
			Jumlah puskesmas terakreditasi	Puskesmas		6	6	6	6	inkes dan KB	
		Pelayanan kesehatan anak	Pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Orang						Dinkes dan KB	
			Persentase imunisasi dasar lengkap	%						Dinkes dan KB	
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%						Dinkes dan KB	
			Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	%						Dinkes dan KB	
			Cakupan kunjungan bayi	%						Dinkes dan KB	

16	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Peningkatan akses air minum	Persentase penduduk berakses air minum	%					Dinas PUPR		
		Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Persentase sarana air minum dalam pengawasan	%					Dinas PUPR		
		Persentase sarana air minum dalam pengawasan	Persentase penduduk berakses air minum	%					Dinas PUPR		
			Persentase rumah tangga bersanitasi	%					Dinas PUPR		
17	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok	Tersedianya Qanun KTR	%	50%	50%				Dinkes dan KB, Bag. Hukum	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
		Sosialisasi Qanun Kawasan Tanpa Rokok dengan melibatkan Forum Anak	Terlaksananya Sosialisasi Qanun Kawasan Tanpa Rokok	Orang						Dinkes dan KB, Dinsos, PMG, PP dan PA	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

		Penyediaan KTR dan larangan IPS Rokok	Persentase penerapan KTR di sarana wajib KTR	%					Dinkes dan K		Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
			Menurunnya jumlah kasus penyakit akibat rokok	kasus						Dinkes dan KB, RSUD	Kawasan Tanpa Rokok
V.	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA										
18	Wajib Bela	Peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan	Angka partisipasi murni (APM SD/MI/Paket A)	jumlah						Disdik pora	Program pendidikan dasar
			Angka partisipasi murni (APM SMP/MTs/Paket B)	jumlah						Disdik pora	Program pendidikan dasar
			Angka partisipasi murni (APM SMA/MA/Paket C)	jumlah						Disdik pora	Program pendidikan menengah
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	%						Disdik pora	Program pendidikan dasar
			Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	%						Disdik pora	Program pendidikan dasar

19	Sekolah Ra	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA yang ditetapkan dengan SK	SRA	2	2				Disdik pora	Program pendidikan dasar
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi menuju SRA	SRA	2	3	5			Disdik pora	Program pendidikan dasar
			Pembinaan, monitoring dan evaluasi SRA	SRA	2	3	5	8		Disdik pora	Program pendidikan dasar
		Pelatihan SDM KHA bagi tenga pendidik	Jumlah SDM terlatih KHA	Orang	1	7	5	30		Disdik pora	Program pendidikan dasar
20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan, kreatifitas dan rekreasi anak	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	karya						Disparbud	
			Jumlah Pusat Kreatifitas Anak	Sanggar						Disparbud	
			Festival kegiatan budaya/kreatifitas anak	Kegiatan						Disparbud	
			Jumlah lapangan olah raga	lapangan						Disdik pora	Program Kepemudaan dan Keolahragaan

		Fasilitasi Pe	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif							Disparbud	
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS										
21a	Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah gampong yang menjalankan PATBM	gampong			2			Dinsos, PMG, PP dan PA	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
		Sosialisasi terpadu lintas sektor tentang penanganan kasus anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan kasus anak	orang				100		Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
21b	Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Sosialisasi tentang larangan pekerja anak dengan melibatkan forum anak	orang				100		Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

22a	Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah anak penyalahan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial	orang						Dinkes dan KB, Dinsos	
		Fasilitasi pencegahan pornografi malalui parenting	Jumlah keluarga tanggap pornografi	orang						Diskominfo	
		Pengobata	Persentase penangan kasus HIV	%						Dinkes dan KB	
			Pravelensi HIV/AIDS dari total populasi	%						Dinkes dan KB	
22b	Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Pelatihan Mitigasi bancana	jumlah sekolah tangguh bencana	Sekolah						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Fasilitasi de	jumlah gampong tangguh bencana	Gampong						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Pemberian bantuan sosial pasca bencana	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial pasca bencana	KK						Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinsos, PMG, PP dan PA	

23a	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas.	Adanya kebijakan tentang perlindungan anak penyandang disabilitas	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang menerima bantuan sosial	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Fasilitasi sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas	persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
23b	Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	*Jumlah KIE melalui media publik tentang Perlindungan anak berkebutuhan khusus terutama bagi anak PSM*	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

24a	Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi	Fasilitasi ABH	Jumlah ABH yang mendapat putusan diversi ditingkat penyidikan	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			Jumlah ABH yang mendapat putusan diversi ditingkat penuntutan	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			Jumlah ABH yang mendapat putusan diversi ditingkat pengadilan	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			Persentase ABH yang mendapat layanan reintegrasi sosial	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

24b	Pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak terlantar/jalanan, berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yag membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Fasilitasi pe	Program pendampingan bagi anak berkebutuhn khusus	orang						Dinsos, PMG, PP dan PA	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak